

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi etnik Mandailing di kecamatan Rambah, Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau adalah suatu hal yang sangat perlu ditelusuri asal-usul kedatangannya, termasuk bagaimana mereka mampu mengadaptasikan diri dan kebudayaannya ditempat yang sama sekali bukan wilayahnya.

Seperti yang umum diketahui, dalam literature Antropologi dikemukakan bahwa etnik Mandailing merupakan salah satu sub etnik Batak yang berdiam di wilayah sepanjang Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di daerah Tapanuli bagian Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa, jika anggota etnik itu berada di luar wilayah kebudayaannya, maka dapat dikatakan bahwa keanggotaan etnik tersebut telah menyebar ke berbagai daerah atau wilayah baru, yang mungkin belum pernah dimasuki.

Demikian pula bahwa, setiap etnis memiliki ciri-ciri yang khusus sebagai sebuah kelompok etnis (*ethnic grup*) yang membedakannya dengan kelompok etnis lain, yang mana dengan adanya ciri-ciri kekhususan tersebut, maka dapat mengenali bahwa mereka itu merupakan bahagian dari kelompok tertentu. Ciri-ciri kekhususan tersebut akan banyak dikenali atau terlihat dalam pelaksanaan ritual adat istiadat yang berlaku umum pada kelompok itu, yang meskipun

mereka telah berada di daerah perantauan, maka unsur-unsur kebudayaan yang berlaku umum pada kelompok itu pasti terbawa dan dengan mudah dapat dikenali.

Dalam masa sekarang, dimana setiap anggota suatu kelompok etnik telah relatif mudah memilih dan menentukan kediamannya, berarti bahwa setiap kelompok etnis atau anggota kelompok tidak lagi dibatasi secara kewilayahan atau teritori. Ini berarti bahwa, agak sulit menyatakan bahwa suatu daerah tertentu merupakan teritori khusus bagi suatu kelompok etnis tertentu pula. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat penyebaran anggota kelompok etnik yang telah relatif mudah dilakukan. Lagi pula, tidak terdapat suatu aturan yang menyebutkan bahwa suatu wilayah tertentu ditujukan bagi kelompok tertentu. Sebagai contoh, Medan pada awalnya adalah daerah hunian asli etnik Melayu, namun kota itu telah cukup heterogen dimana terdapat 8-10 kelompok etnis yang mendiaminya, bahkan etnik Melayu sebagai penduduk *host* telah banyak menyingkir ke daerah *pheriperi* kota.

Demikian pula, dengan daerah lain seperti Riau dimana daerah itu juga dikenal sebagai basis Melayu. Akan tetapi dalam perkembangan masa kini, daerah itu juga telah dihuni oleh ragam kelompok etnis terutama dari daerah Sumatera Utara yakni kelompok Batak (Toba dan Mandailing) yang sedikit banyaknya telah merubah struktur ke-etnis-an di daerah itu.

Sebagaimana yang umum diketahui bahwa pada saat terjadinya perpindahan penduduk atau migrasi, maka tak dapat di pungkiri bahwa kelompok etnis pendatang yakni kaum migran di daerah yang baru dimasuki itu, maka segala atribut yang melekat pada diri dan kebudayaannya dari daerah asal akan terbawa (*cultural borrowing*) ke daerah yang baru tersebut. Hal ini berarti bahwa,

kelompok etnis pendatang yakni kaum migran tersebut yang datang dengan segala atribut kebudayaan yang melekat pada dirinya akan menghadapi suatu hal yang serba baru, yang tidak saja ditunjukkan oleh wilayah yang baru tetapi juga individu dan kebudayaan yang baru. Demikian pula, dengan penduduk setempat, dimana mereka akan diperhadapkan pada kenyataan bahwa sekelompok orang atau beberapa orang telah memasuki daerah mereka yang sudah barang tentu berbeda dengan mereka ataupun kebudayaan mereka, atau bisa juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di balik kedatangan kaum migran tersebut berupa eksploitasi lahan dan sumber daya alam atau hal lainnya yang bersifat dominasi bersifat ekonomi, kebudayaan ataupun politik.

Pertemuan diantara dua atau lebih kebudayaan itu, akan berdampak pada dua bentuk akhir yakni terciptanya keserasian sosial berupa adanya harmoni dan integrasi antar kelompok etnis atau sebaliknya berujung dengan ketidakserasian berupa disharmoni dan disintegrasi antar penduduk setempat dan kaum migran. Fenomena pertama yang disebut diatas bisa wujud, karena: *pertama* adanya penerimaan (*acceptance*) antara individu atau kelompok yang berbeda budaya itu yakni adanya keuntungan yang mutualis sehingga kecurigaan-kecurigaan yang bermotif ekonomi ataupun budaya itu hilang. Atau bisa juga karena adanya faktor-faktor integrasi (*integrative factor*) seperti kemiripan budaya atau adanya ikatan yang dapat mempersatukan kedua kelompok etnik. Akibatnya terciptalah hubungan antar etnik yang terjalin dengan baik yang berujung pada adanya keserasian sosial antar etnik. Model ini dapat wujud karena adanya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari hubungan sosial itu, misalnya, kaum migran yang

mengontrak rumah atau lahan penduduk setempat. Singkatnya, terdapat hubungan yang saling komplementer dan mutualis dalam kehidupan sehari-hari.

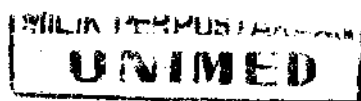
Kedua yakni, pada awalnya terjadi sikap saling menolak, namun seiring dengan adanya interaksi sosial (*social interaction*) yang terjadi setiap saat dimana sekaligus menciptakan pengenalan serta penyesuaian secara lebih jauh dan mendalam (*adaptation and asimilation*) yang pada akhirnya membentuk perpaduan budaya (*aculturation*). Situasi dan kondisi ini akan memberikan peluang pada berbagai kesempatan ekonomi dan budaya dimana setiap individu akan dapat memaksimalkan aktivitasnya. *Ketiga* yakni bahwa kelompok migran menyadari bahwa mereka adalah pendatang di tempat itu, sehingga mengambil sikap hati-hati dalam membina kontak sosial maupun dalam setiap bentuk aktivitas sehari-hari agar tidak sampai melahirkan penilaian yang negatif terhadap mereka. Model ini dapat tercapai misalnya dengan cara membentuk hidup bersama (membraur) dengan penduduk setempat, tidak eksklusif (mengisolir diri) dan tidak membatasi diri secara objektif serta tidak imperatif atau peyoratif.

Keempat yakni adanya persamaan budaya antara kedua kelompok itu. Persamaan itu bisa jadi karena kesatuan agama, mata pencaharian, seni dan lain-lain yang melahirkan moralitas budaya yang dapat diterima secara umum. Disamping itu, ikatan budaya yang tidak terlalu eksklusif (mengedepankan imperatif etnisnya) akan sangat mendukung terjadinya penerimaan antara kelompok etnis yang berbeda kebudayaan itu. Sedang fenomena yang disebut kedua, yakni adanya ketidakserasian sosial dalam masyarakat berupa terjadinya penolakan-penolakan antar etnik adalah bentuk lain ataupun pengingkaran dari

empat faktor yang disebut mendukung terciptanya keserasian sosial dalam masyarakat diatas.

Faktor-faktor pemersatu (*integrative factor*) itu bisa jadi meliputi aspek demografi yang mencakup jumlah populasi, perbandingan penganut agama, perbandingan ke-etnis-an, ataupun banyaknya kawin campur antar kelas-kelas kelompok. Bisa pula dari pola-pola pemukiman dalam *spatial arrangement* yang membaaur atau tidak terdapat segregasi (polarisasi) tempat tinggal yang berdasarkan kelas-kelas tertentu. Disamping itu, faktor lainnya adalah kemampuan berfungsinya sesuai tugas dan peran yakni lembaga-lembaga atau institusi sosial (*social institution*) seperti lembaga pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, perkumpulan olah raga, perkumpulan pemuda, asosiasi lingkungan (*Urban Tolong Menolong*) ataupun paguyuban berdasarkan kedaerahan. Faktor terakhir adalah nihilnya penilaian atau tanggapan yang bersifat imperatif terhadap etnisnya, serta peyoratif terhadap etnis atau kelompok lain sehingga mampu membentuk kesamaan persepsi.

Faktor-faktor ini, bila berfungsi sesuai tugas dan perannya, maka akan sangat berkontribusi dalam penciptaan atau terbentuknya masyarakat yang terbuka, tidak inklusif dan segregatif yang tampak pada berbagai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Bisa jadi, tanggungjawab yang dimaksud adalah terkait kebersihan lingkungan, keamanan dan kenyamanan lingkungan, partisipasi dalam jamuan adat istiadat, rembug masyarakat, gotongroyong, atau bentuk lain yang mencerminkan sifat keterbukaan, kesamaan tujuan dari kedua kelompok.



Oleh karena itu, penelitian ini di arahkan pada tema terciptanya keserasian sosial pada dua kelompok etnik yakni kelompok etnis Melayu sebagai penduduk setempat dan kelompok etnis Mandailing sebagai kaum migran di Pasirpengarayan *Luhak* (Kecamatan) Rambah kabupaten Rokan Hulu Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi beberapa persoalan yang lahir dalam menjelaskan pertemuan dua atau lebih kelompok etnik yang berbeda kebudayaan. Persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda yakni kebudayaan Mandailing (*migrants*) dan Melayu (*culture hosts*) di Pasirpengarayan Riau.
2. Adaptasi dan asimilasi serta akulturasi yang terjadi antara kelompok etnis pendatang Mandailing dan kelompok etnis Melayu setempat.
3. Kesempatan untuk memperoleh penghidupan (sektor ekonomi) bagi etnik migran Mandailing di daerah perantauan.
4. Interaksi sosial kelompok etnik migran Mandailing dengan kelompok etnik Melayu setempat.
5. Reaksi ataupun tanggapan penduduk Melayu setempat terhadap kaum migran Mandailing
6. Wujud interaksi antara etnik migran Mandailing dengan masyarakat Melayu setempat.

C. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini, ke fokus kajian yang akan di teliti yakni bagaimanakah kescrasian sosial antara kaum migran Mandailing dengan masyarakat setempat yakni Melayu, maka berikut akan dibatasi masalah-masalah yang akan di teliti secara mendalam, yakni:

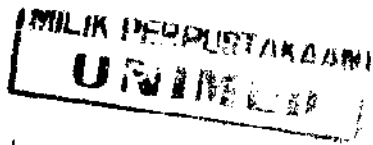
1. Interaksi sosial kelompok etnik migran Mandailing dengan kelompok etnik Melayu setempat di Pasirpengarayan Riau Kabupaten Rokan Hulu Riau?
2. Reaksi ataupun tanggapan penduduk Melayu setempat terhadap kaum migran Mandailing
3. Wujud interaksi antara etnik migran Mandailing dengan masyarakat Melayu setempat.
4. Adaptasi dan asimilasi serta akulturasi yang terjadi antara kelompok etnis pendatang Mandailing dan kelompok etnis Melayu setempat.

D. Perumusan Masalah

Sejalan dengan poin-point yang telah disebutkan pada identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah seperti yang dirumuskan dibawah ini, yakni:

1. Bagaimanakah interaksi sosial kelompok etnik migran Mandailing dengan kelompok etnik Melayu setempat di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?

2. Bagaimanakah reaksi ataupun tanggapan penduduk Melayu terhadap kaum migran Mandailing di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?
3. Bagaimanakah bentuk interaksi antara etnik migran Mandailing dengan masyarakat Melayu di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya keserasian sosial antara etnis Melayu dan migran Mandailing di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?



E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah interaksi sosial kelompok etnik migran Mandailing dengan kelompok etnik Melayu setempat di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah reaksi ataupun tanggapan penduduk Melayu terhadap kaum migran Mandailing di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah wujud interaksi antara etnik migran Mandailing dengan masyarakat Melayu di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?
4. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya keserasian sosial antara etnis Melayu dan migran Mandailing di Pasirpengarayan Kabupaten Rokan Hulu Riau?

F. Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan gambaran yang valid tentang interaksi sosial antara masyarakat Melayu dengan migran Mandailing di Pasir Pengaraian Kabupaten Karimun, Indonesia umumnya.
2. Memberikan informasi yang empiris tentang terciptanya keserasian sosial pada kelompok masyarakat yang heterogen.
3. Sebagai kerangka acuan dalam membina kehidupan masyarakat yang harmonis, kebhinekaan etnis dan budaya masyarakat Bangsa Indonesia.

G. Studi Teoritis

1. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan*

Menurut Koentjaraningrat (1981:146) yang dimaksud dengan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu *adat istiadat* tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (*common identity*). Pengertian diatas mirip dengan defenisi masyarakat yang diajukan oleh Gillin dan Gillin (1954:139) bahwa masyarakat (*society*) adalah "...the largest grouping in which common customs, traditions, standards, and feeling of unity are operative". Dimana 'grouping' menyerupai 'kesatuan masyarakat', 'common customs', 'traditions' adalah unsur 'adat istiadat' dan 'common attitudes and feeling of unity' adalah unsur 'identitas bersama'.

Pendefinisian masyarakat seperti yang dilakukan oleh Gillin dan Gillin diatas termasuk dalam kelompok masyarakat "*largest grouping*" yang berkaitan

ini dapat dikategorikan sebagai konsep masyarakat yang lebih luas seperti dalam konteks negara yakni masyarakat Indonesia. Namun dalam pengertian yang lebih sempit, masyarakat dapat merupakan kesatuan warga seperti satu desa, satu kota dan bahkan dalam kesatuan kekerabatan seperti marga (*clan*) atau etnis. Oleh karena itu, rangkaian kelompok masyarakat yang kecil yang dibentuk oleh suatu ikatan tertentu dapat membentuk ikatan yang lebih luas seperti negara. Ini berarti bahwa, sebuah kelompok kekerabatan seperti *marga* pada orang Batak, pada dasarnya adalah sumber dari warga negara yakni dengan terbentuknya ikatan dengan orang atau kelompok lain seperti dengan orang Jawa, Ambon dan Papua hingga pada akhirnya terbentuk kesatuan masyarakat yang lebih luas dalam bernegara yakni sebagai warga negara Indonesia.

Berbeda dengan masyarakat, maka istilah lain yang agak rancu adalah pengertian dari komunitas. Istilah masyarakat diterjemahkan sebagai istilah umum bagi satu kesatuan hidup manusia, karena itu bersifat lebih luas dari komunitas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan yang terikat oleh satu kesatuan adat-istiadat (*common customary law*) dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat lebih khusus karena ciri tambahannya yakni adanya ikatan lokalitas atau kesadaran wilayah. Dengan demikian, komunitas seperti yang didefinisikan oleh Mc. Iver dan Page (1937: 8-9) adalah "kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah nyata dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas" Oleh karena itu, pengertian masyarakat jauh lebih luas jika dibandingkan dengan komunitas. Namun persamaan dari kedua terminologi

itu adalah bahwa keduanya merupakan kumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi.

Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dalam konteks negara misalnya, merupakan sekumpulan manusia yang terdiri dari berbagai prasarana yang memungkinkan para anggotanya dapat berinteraksi secara intensif dengan frekuensi yang tinggi. Prasarana itu bisa jadi seperti jaringan komunikasi dan transportasi udara, darat dan laut, telepon, surat kabar dan lain-lain. Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kolektif manusia itu akan saling berinteraksi. Namun demikian, tidak semua kesatuan manusia yang bergaul dan berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus.

Sekumpulan orang yang mengerumuni seorang tukang obat di pelataran kaki lima, orang-orang yang menonton simulasi *catur* di pasar tradisional bukanlah disebut suatu masyarakat, karena meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas, mereka tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali berupa perhatian terhadap tukang obat tadi. Demikian pula sekumpulan orang yang menonton pertarungan sabung ayam di Bali. (Geertz, 1973:412-453).

Adapun ikatan yang membuat suatu kesatuan kolektif manusia itu menjadi suatu masyarakat adalah tergantung pada pola tingkah laku khas mengenai faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagi pula, pola itu harus mantap dan kontiniu. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa pola khas itu haruslah sudah menjadi adat atau kebiasaan yang khas. Kecuali ikatan adat

istiadat yang meliputi sektor kehidupan serta kontinuitas dalam waktu, suatu kesatuan masyarakat manusia juga memiliki ciri lain yakni suatu rasa identitas diantara para warganya (*common identity*) atau mereka memang merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan lainnya.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa masyarakat adalah sekumpulan kolektif manusia. Maka dapat dipastikan bahwa manusia itu memiliki kebudayaan yang jika dibandingkan dengan sekumpulan manusia lain, maka kebudayaan tersebut akan berbeda. Oleh karena itu, sekumpulan kolektif manusia yang memiliki karakteristik sendiri yang diterima secara umum dan berlaku pada kolektif manusia itu dapat disebut sebagai kelompok etnik (*Ethnic group*). Dengan mengutip pendapat Naroli, Barth (1988: 11) mendefenisikan bahwa kelompok etnik (*ethnic group*) adalah populasi yang:

1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, 2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, 3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari populasi lain.

Telah disebutkan diatas bahwa untuk pada saat sekarang, dimana kelompok masyarakat tidak lagi dibatasi secara teritorial. Hal ini mengingatkan kita pada kenyataan bahwa hampir tidak ada lagi ditemukan di muka bumi yang disebut bahwa suatu teritori tertentu adalah teritori kelompok etnis tertentu pula. Memang, di beberapa tempat masih dijumpai kelompok-kelompok etnis terasing seperti etnis *Sakai*, etnis *Laut* di pedalaman Riau, atau beberapa kelompok etnis di Kalimantan dan Papua, namun, wilayah mereka itu telah pula disentuh oleh kelompok lain yang bukan dari kelompoknya.

Kenyataan seperti ini bermuara pada adanya dinamika masyarakat berupa perubahan sosial dan budaya yang menyertai manusia itu, lagi pula realisme di masyarakat bahwa hampir setiap kelompok-kelompok ke-etnis-an dalam masyarakat itu telah bercampur baur baik secara teritori atau dengan cara kawin mawin. Jika kita menentukan suatu batasan kelompok etnik berdasarkan atribut-atribut tertentu yang menandakan sebuah kelompok etnik seperti kekerabatan, teritori dan lain sebagainya, maka kita telah berupaya membuat suatu standar pengelompokan sebagaimana lazimnya pada masyarakat tradisional yang masih menjaga keutuhan kekerabatan dan teritorinya (Barth, 1988).

Kajian-kajian Barth dan Bruner dalam Pelly (1994:4) menjelaskan bagaimana suatu kelompok etnik tertentu (Batak Toba) belajar memodifikasi segi-segi budaya tertentu mereka agar dapat diterima oleh kelompok etnik lainnya dalam proses interaksi, bahkan terkadang dalam persaingan antar kelompok etnik, identitas dan batas etnik yang mereka miliki di pandang perlu untuk menyamarkan dan menyembunyikan, bahkan penyamaran tersebut juga difasilitasi juga oleh berbagai asosiasi-asosiasi sukrela keagamaan sebagai upaya adaptasi dalam menghadapi berbagai perbedaan dan perubahan dalam kehidupan.

Justru yang terjadi adalah sebaliknya yakni adanya penyebaran antar individu maupun kelompok yang melintasi batas budaya dan teritori tertentu yang bisa terjadi dalam suatu wilayah ataupun antara wilayah dan bahkan antar provinsi dan antar negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penduduk atau masyarakat dan bahkan individu dari suatu kelompok tertentu telah dengan mudahnya memasuki kawasan lain walaupun itu bukan wilayah kebudayaannya. Dengan

begitu, kita dapat menyatakan bahwa mobilitas individu yang melintasi batas teritori dan kebudayaan tersebut dapat kita sebut sebagai perpindahan penduduk.

Mobilitas penduduk atau migrasi dapat terjadi disebabkan oleh adanya proses modernisasi maupun industrialisasi, ataupun dikarenakan oleh laju pertumbuhan yang tinggi (natalitas) yang bertolak belakang dengan mortalitas. Dalam bahasan Geertz (1974), dimana pengkruktan lahan pertanian di pedesaan sebagai dampak dari kemiskinan yang dibagi (*shared poverty*) dengan stagnasi masyarakat juga dapat meningkatkan migrasi penduduk desa ke kota (daerah baru) karena desa dianggap 'tidak sanggup' lagi menyediakan lahan untuk pertanian. Oleh karena itu, penduduk desa berupaya mencari lahan lain yang memungkinkan mereka dapat memperoleh lahan yang baru ataupun sumber penghidupan yang baru bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, migrasi dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal (*residential*) secara permanen ataupun temporer dengan tidak membatasi jarak maupun sifatnya (Lee, 1987).

Dalam konteks lain, Mochtar Naim (1984) mengemukakan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, bahwa migrasi identik dengan merantau yakni ditandai dengan adanya perpindahan (pergi keluar daerah) dengan kemauan sendiri dan akan berkomunikasi serta berinteraksi tidak hanya dengan etnisnya melainkan juga etnis dan kultur yang berbeda-beda. Walaupun demikian, migrasi dengan model merantau, pada umumnya adalah bersifat sementara yang disebabkan karena para perantau tersebut memiliki keinginan untuk kembali ke daerah asalnya. Kebiasaan seperti ini, biasanya telah

direncanakan sebelumnya sehingga konsep utamanya adalah *mobilisasi* (pindah) (penghasilan) di daerah lain dan memberikan kontribusi bagi keberlanjutan daerah asal.

Proses terjadinya mobilitas (migrasi) dalam hal ini, apakah *spontaneous* secara spontan seperti urbanisasi yang didorong oleh kemiskinan di daerah asal karena motivasi lainnya seperti melanjutkan studi. Sebaliknya, *transmigrasi* cenderung didorong oleh kepadatan penduduk kota sehingga dipandu pemerintah untuk mendistribusikan penduduk ke daerah yang relatif jarang penduduknya. Oleh karenanya, migrasi dalam hal terkecilpun seperti perpindahan *urbanisasi* melibatkan perpindahan fisik dan non fisik dari individu tersebut. Melalui berpindahnya orang yang bersangkutan yang juga disertai oleh perpindahan *social* sosial lainnya seperti aspek kekerabatan, karakteristik kebudayaan, *kebiasaan* kebiasaan daerah asal.

Dengan berlatar belakang kemiskinan dan ketidakcukupan *subsistence* pertanian seperti di pulau Jawa, telah mendorong penduduk Pulau Sumatra untuk melakukan migrasi, baik melalui transmigrasi ataupun karena *kepaksaan* sebagai budak kolonial di perkebunan Sumatera Timur. Berbeda dengan *transmigrasi* Batak (Toba dan Mandailing) yang migrasinya lebih dilatarbelakangi oleh pencaharian pekerjaan sebagai upaya mewujudkan *cita-cita* *hasangapon* *hasangapon*, dan *hagabeon*. Pada akhirnya, banyak diantara migran Batak ini menjadi raja-raja tanah ditempat yang baru itu (Bruner, 1974).

Schubungan dengan hal tersebut, Sairin (2002) mengemukakan bahwa terjadinya migrasi dalam arti secara fisik dari suatu tempat ke tempat lain antara

geografis, baik secara permanen maupun tidak, disebabkan oleh dua faktor utama yakni faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asalnya (*origin*) dan faktor penarik (*pull factor*) di daerah tujuan (*destination*). Dalam hal lain, faktor seperti ekologi, ekonomi, sosial dan politik turut pula melatar belakangi migrasi tersebut. Singkatnya, menurut Lee (dalam Sairin, 2002:79) migrasi terjadi karena adanya faktor negatif dan positif di daerah asal dan daerah tujuan.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa pada saat individu memutuskan untuk berpindah, maka perpindahan itu tidak saja terjadi secara fisik tetapi juga disertai oleh kebudayaannya, yakni berbagai atribut yang melekat pada dirinya. Hal ini bisa wujud seperti yang dikemukakan oleh Pelly (1985) dalam menggambarkan perkembangan kota Medan yakni dipertahankannya kebiasaan lama dalam membangun perumahan atau pemukiman (misalnya) yang homogenous untuk kelompok etnis (*primordial*) tertentu. Selain itu, Manteau (1958) dalam Pelly (1985) menggambarkan tentang kehidupan sosial masyarakat dikota-kota di Indonesia. Kota merupakan suatu tempat pengumpulan suatu keluarga atau kelompok masyarakat organisasi sosial. Masing-masing harus bergumul untuk mendapatkan tempat yang perlu untuk hidup dan belajar.

Dalam persaingan seperti itu, mereka mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, norma-norma yang berlainan serta tujuan hidup dan idealisme yang berbeda-beda pula, bahkan mempunyai lembaga-lembaga (pranata) sosial yang tidak sama. Anggota kelompok tertentu kurang memperhatikan tradisi-tradisi yang berlaku pada kelompok lain. Kelompok lain dianggap sebagai "*orang asing*" atau bukan kerabat (Bruner, 1974). Akibatnya tidak ada satu kelompok

pun yang mau mengabdikan dirinya demi pertumbuhan (kota) yang berarti dan memuaskan. Itulah sebabnya mengapa kota-kota di Indonesia tumbuh dengan tidak teratur dimana masing-masing kelompok hanya memikirkan perbaikan fasilitas perumahan dan lingkungan tempat tinggal mereka sendiri secara terpisah-pisah (Manteau, 1958).

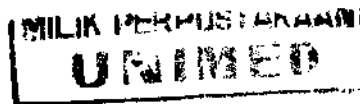
Fenomena lain ditunjukkan oleh Edward M. Bruner (1961) dan Pelly (1984) dalam kasus kota Medan yakni ketiadaan budaya dominan (*dominant culture*) dimana kelompok-kelompok etnis yang ada cenderung untuk kembali kepada ikatan-ikatan primordial (*primordial ties*) yang bersifat eksklusif. Kecenderungan ini menimbulkan kehidupan yang segregatif atau polarisasi pemukiman berdasarkan strata ekonomi dan sosialnya. Akibatnya, Medan kaya dengan sejumlah pemukiman kelas elit sampai kelas rendahan dan bahkan yang bcrumah di kolong jembatan sekalipun.

Sungguhpun pembahasan yang dilakukan oleh Clifford Geertz (1973), Usman Pelly (1983 ; 1984) dan Manteau (1958) pada umumnya berada di daerah perkotaan, namun peneliti berkeyakinan bahwa fenomena tersebut turut mewarnai migrasi penduduk yang terjadi disetiap kota di Indonesia, Medan pada khususnya. Oleh sebab itu, uraian dari ketiga pakar tersebut juga digunakan dalam penelitian ini terutama dalam membandingkan keserasian sosial di kota Medan dengan daerah penelitian ini yakni Riau.

Selanjutnya, seperti yang telah diurai didepan dimana kebudayaan dalam hal ini diartikan sebagai keseluruhan gagasan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan alam serta

menjadi kerangka landasan untuk mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan (Pelly, 1985). Dalam definisi ini, kebudayaan dilihat sebagai "rekayasa pengendalian" (*control mechanism*) bagi kelakuan manusia (Geertz, 1973) atau sebagai pola tingkah laku manusia (Keesing dan Keesing, 1971). Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri dari serangkaian model kognitif yang digunakan oleh manusia sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972).

Koentjaraningrat (1981) antara lain menyatakan bahwa salah satu unsur dari kebudayaan yang bersifat ide itu adalah norma-norma atau aturan-aturan sebagai pedoman untuk berinteraksi bagi sesama anggota masyarakat pendukungnya. Sistem norma itulah yang disebut dengan pranata sosial yang diorganisasi oleh lembaga-lembaga sosial.



2. Migrasi

Banyak faktor yang memungkinkan seseorang dan bahkan kelompok masyarakat melakukan migrasi. Dalam banyak hal migrasi itu dapat dikarenakan oleh alasan untuk menemukan kehidupan yang lebih baik yang tentu saja bertumpu pada alasan ekonomi. Ada juga karena keinginan mencapai dan mencari pendidikan yang lebih baik di kota. Namun demikian, adapula yang melakukan migrasi karena terpaksa seperti akibat bencana alam, perang atau ledakan politik dari negaranya sehingga mengharuskan orang tersebut mencari suaka politik di negara orang lain.

Selanjutnya, menurut Dixon (1952:17) bahwa migrasi dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan faktor yang mengakibatkan terjadinya migrasi tersebut. *Pertama* adalah akibat tekanan ledakan politik yang terjadi secara tiba-tiba seperti banjir, gempa, bom dan lain-lain. *Kedua* adalah akibat pengusiran besar-besaran, kekalahan perang dan berbagai sebab yang lebih sukarela seperti keinginan untuk menjelajahi, kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik ataupun keinginan untuk menempati negeri yang baru.

Namun, pada dasarnya hampir semua perpindahan tertumpu pada aspek kehidupan yang mengupayakan tentang apa yang dilakukan oleh migran di tempat yang baru. Oleh pakar geografi misalnya, melihat migrasi yang dilakukan oleh orang berdasarkan jarak dari suatu daerah ke daerah lain berdasarkan perubahan lingkungan sosial. Jarak itu sendiri dapat ditentukan oleh perubahan lingkungan yang masih ada di daerah yang sama maupun daerah yang relatif berbeda. Namun demikian, migrasi dapat juga dipandang sebagai suatu proses dimana migran bertindak untuk berpindah secara budaya, ekonomi dan lingkungan sosial.

Selanjutnya, Mier (1987) menguraikan bahwa migrasi dari sudut pandang ekonomi terutama adalah para buruh atau pekerja yang merupakan gejala atau fenomena meluasnya sektor ekonomi, politik dan perubahan sosial. Berdasarkan pandangan ini, pengertian migrasi bukan hanya sekedar terbatas pada perpindahan penduduk, tetapi cenderung merupakan akibat dan bahkan sebahagian daripada perubahan-perubahan tersebut.

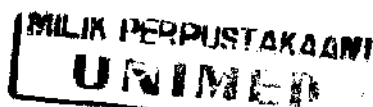
Dalam hal lain, Usman Pelly dalam disertasinya: "*Urbanisasi dan Adaptasi*" (1994) mengemukakan bahwa gejala migrasi sekaligus sebagai alat

penerapan misi budaya yakni sekumpulan tujuan yang diharapkan dicapai oleh anggota-anggota suatu masyarakat tertentu yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan konteks dimaksud ada pada dua kelompok masyarakat yang ditelitinya yakni Mandailing dengan Minangkabau. Dengan mengetahui misi apa yang dikandung dalam migrasi tersebut, kiranya dapat diketahui faktor apa yang menjadi penyebab dan tujuan dari migrasi yang dilakukan.

Dalam masyarakat Mandailing yang bermigrasi ke Sumatera Timur pada akhir abad-18 mengemukakan bahwa alasan itu bukan hanya berdasar pada alasan ekonomi tetapi juga berdasarkan pandangan sosial budaya yakni ideologi budaya yang saling berkaitan menjadikan mereka untuk bermigrasi. Berbeda dengan masyarakat Minangkabau yang melakukan migrasi yang semata-mata disebabkan oleh desakan ekonomi, dimana kampungnya tidak dapat diharapkan memberikan pendapatan baru sehingga mendesak mereka untuk melakukan migrasi. Tujuan migrasi seutuhnya adalah untuk mencari pendapatan (mengumpulkan uang) secara periodik kemudian membawa uang tersebut kembali kedaerahnya. Disana mereka membangun rumah, membeli tanah ataupun membangun Sunat dan Masjid.

Jadi, migrasi pada masyarakat Mandailing bukan semata-mata disebabkan oleh desakan ekonomi tetapi cenderung untuk mencari prestise yang lebih baik tanpa menghubungkan antara daerah rantau dengan daerah asal. Di daerah rantau tersebut, mereka seolah tidak mempedulikan keadaan kampungnya yang ditinggalkan oleh mereka, tetapi cenderung untuk memperluas *harajaon* di *Bumi*

ni ranto seperti menjadi pejabat dan penguasa sektor ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan orang Minangkabau lebih mentik beratkan pada sektor ekonomi dengan mendirikan rumah-rumah makan khas Padang, memupuk pendapatan dan membawanya ke kampung halaman yang terjadi pada saat liburan hari-hari besar keagamaan seperti lebaran.



3. *Keserasian Sosial*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) kata '*keserasian*' dari kata dasar '*serasi*' yang bermakna '*sesuai*', '*cocok*', '*selaras*' ataupun '*harmonis*'. Afiks ke-an pada kata dasar itu menjurus pada kata sifat yakni menjadi '*kesesuaian*', '*kecocokan*', '*keselarasan*' ataupun '*keharmonisan*' yakni suatu (kondisi) yang sesuai, cocok, selaras dan harmonis. Oleh karena itu, keserasian sosial dapat diartikan sebagai kondisi hubungan yang harmonis antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau antara satu etnis dengan etnis lainnya. yang ditunjukkan oleh derajat hubungan yang serasi, sesuai dan selaras. Dalam keadaan seperti ini, keserasian sosial dapat di katakan sebagai pola kerukunan hidup bersama yang bersifat dinamis yang ditandai dengan adanya jalinan kerjasama (korporasi), akomodasi, akulturasi dan asimilasi.

Dalam laporan Penelitian yang diketuai oleh Usman Pelly (1985) tentang menciptakan prakondisi keserasian hidup di 6 kelurahan kota Medan, yang membandingkan terciptanya keserasian hidup dari tiga pola pemukiman. Pola pemukiman yang dimaksud adalah pola pemukiman belum membaur (*segregatif*) yang terdapat di Pulau Brayan dan Sidorejo, pola pemukiman setengah membaur

(Sekip dan Sei Putih Timur) serta pola pemukiman membaaur (Sidodadi dan Merdeka). Lebih lanjut disebutkan bahwa, terbentuknya pola-pola pemukiman tersebut, secara nyata disebabkan oleh faktor-faktor seperti 1) faktor demografis yang meliputi: a) agama, b) pendidikan, pekerjaan, c) identitas etnis, d) pasangan suami istri yang kawin campur, dan 2) strata sosial ekonomi.

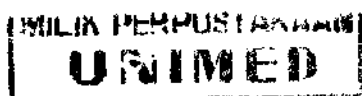
Keserasian hidup yang tercipta atas pola pemukiman yang cenderung segregatif disebabkan oleh kurang membaurnya masyarakat di daerah itu, baik secara etnisitas, agama, ataupun identitas etnis mereka. Oleh karena dominasi yang ada tersebut, cenderung mengurangi peran lembaga-lembaga seperti pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, organisasi pemuda, perkumpulan olah raga, asosiasi atau paguyuban ataupun asosiasi kedaerahan dalam rangka menciptakan keserasian hidup. Sementara itu, pada pola pemukiman yang setengah membaaur, dimana dominasi-dominasi seperti dikemukakan diatas sudah relatif berkurang sehingga peran-peran dari lembaga-lembaga atau pranata tersebut sudah mulai bekerja.

Selanjutnya, pada pola pemukiman yang telah membaaur, maka dominasi-dominasi seperti diatas hampir tidak dapat ditemukan lagi sehingga institusi sosial telah aktif bekerja, dan hal inilah yang disebut sebagai prasyarat atau prakondisi dalam terciptanya keserasian hidup. Oleh karena itu, dalam pembahasan Pelly (1985) dikota Medan tersebut dikemukakan bahwa keserasian hidup (sosial) adalah bentuk (*pattern*) kebersamaan hidup (*togetherness*) dalam suatu masyarakat (majemuk) yang saling mengerti, komunikatif, terbuka dan dinamis serta tidak segregatif dan eksklusif. Lebih lanjut, dalam Panduan

Pelaksanaan Pengukuran Kescrasian Sosial (1992:7) diuraikan bahwa keserasian sosial adalah suatu keadaan dan suatu proses kehidupan bersama, dimana hubungan interaksi antar kelompok dan anggota masyarakat lebih bersifat asosiatif sehingga memungkinkan berlangsungnya kehidupan dan perkembangan berkelompok atau bermasyarakat yang memberikan kepuasan lahir dan bathin bagi semua pihak.

Untuk mendukung terciptanya keserasian sosial dikalangan masyarakat, maka terlebih dahulu diawali oleh tumbuhnya interaksi yakni kontak timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kontak sosial atau interaksi itu sangat penting dalam menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat, oleh karenanya dalam menciptakan keharmonisan tersebut, perlu diindahkan hal-hal berikut yakni: 1) Kontak sosial, 2) komunikasi, 3) struktur sosial dan 4) bentuk interaksi (Chitambar, 1973). Hal pertama berarti suatu gejala sosial yang terjadi akibat adanya hubungan yang terjadi antara sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Terjadinya interaksi antara dua kelompok etnis yakni masyarakat setempat (*host population*) dengan masyarakat pendatang (*migrant*) dalam mendiami wilayah pemukiman (*settlement*) dengan segala aspek sosial ekonomi. Bentuk kegiatan itu dapat bersifat sepihak, secara timbal balik maupun berdiri sendiri selaras dengan kemauan masyarakat atau suasana yang tercipta sebelumnya.

Terdapat kontak sosial antar kelompok apabila ada tanggapan timbal balik serta penyesuaian perilaku dalam diri pihak-pihak yang melakukan kontak sosial



terhadap pihak lain. Terjadinya proses secara timbal balik dan proses penyesuaian diri antar kelompok etnis berkaitan dengan proses sosialisasi yang ada dalam kelompok dan budaya masing-masing serta kontinuitas pola ajar di lembaga-lembaga formal yang ada. Proses sosialisasi dalam hal ini adalah pemeliharaan kontinuitas normatif dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai kemasyarakatan yang bukan saja sekedar tuntunan moral bagi pelakunya dalam bertindak sehari-hari, tetapi juga merupakan sentral pengertian baginya. Nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai universalitas yang berlaku general mengenai tata krama dan nilai performa sosial yang harmonis, yakni semacam moralitas yang berlaku umum. Kedua nilai ini akan dijumpai di setiap kelompok etnis yang walaupun bervariasi sesuai dengan budaya yang dianut masing-masing etnis.

Point kedua yakni komunikasi terjadi akibat adanya kontak sosial. Komunikasi memegang peranan penting bahwa seseorang dapat memberikan tafsiran pada perilaku orang lain melalui wujud oral, bahasa dan gerak tubuh, sikap dan perasaan. Pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi serta pemahaman dari bahasa itu sendiri akan memberikan peluang untuk mengenal lebih jauh lagi tentang struktur, nilai dan norma maupun adat istiadat kelompok sosialnya. Untuk itu, dibutuhkan institusi yang mengatur dan mempengaruhi bentuk-bentuk hubungan sosial yang harmonis. Dengan adanya perilaku dan penampilan sosial yang harmonis ini akan memungkinkan terciptanya hubungan sosial antar kelompok etnis dalam suatu struktur, dimana masing-masing terkait dengan norma-norma sosial, beragam perasaan yang didasari pada nilai-nilai yang menentukan perilaku selama berinteraksi pada berbagai posisi dan status sosial.

Hubungan sosial yang ada dalam suatu struktur yang disertai dengan unsur-unsur yang saling mendekatkan diri ke arah terciptanya korporasi dan akomodasi, sedang sebaliknya adalah konflik.

Kehidupan bersama dalam kelompok dimana terdapat korporasi antara masing-masing anggota yang memiliki ciri suatu organisasi, pada dasarnya tidak mencerminkan integrasi. Dalam hal ini, sesuai dengan batasan Linton (1984:264) integrasi diartikan sebagai perkembangan progresif dalam rangka menyesuaikan-persesuaian yang sempurna antara berbagai unsur-unsur, yang secara bersama-sama mewujudkan '*total culture*'. Sedang tingkat atau taraf integrasi (persesuaian) tersebut (*degree of integration*) ialah taraf penyesuaian yang telah dapat dicapai pada suatu titik tertentu di dalam '*culture continuum*'.

Oleh karena kebudayaan itu merupakan sebuah formasi yang bagian-bagiannya saling sesuai menyesuaikan, sebab itu masuknya setiap unsur kebudayaan yang baru tentu akan mengganggu keseimbangan yang telah ada. Sebelum unsur itu dapat menjadi universalitas dan spesialisitas, lebih dahulu harus melalui serangkaian proses penyesuaian-penyesuaian. Gejala saling sesuai menyesuaikan antara unsur-unsur kebudayaan itu lazim dikenal dengan integrasi.

Interrelasi antara unsur-unsur di dalam lingkungan sesuatu kebudayaan adalah sedemikian kompleksnya, sehingga sebenarnya sangat sukar untuk mengkaji integrasi didalam aspeknya yang statis (Linton, 1984). Dua aspek yang tampaknya tidak saling berhubungan, dalam kenyataannya dapat berhubungan, rapat dan erat, berkat penyesuaian masing-masing unsur dengan serangkaian unsur-unsur lainnya. Fakta ini akan nampak jelas apabila mengkaji integrasi di

dalam prosesnya, dengan mengamati jalanya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian baru antara unsur-unsur yang telah ada, yang setiap kali terjadi apabila ada sebuah unsur baru diterima di dalam formasi kebudayaan.

Keadaan seperti ini ditunjukkan oleh Linton (1984) dengan mengambil contoh di Madagascar, dimana terjadi perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat etnis *Tanala* sebagai akibat masuknya sistem bersawah. Sistem bersawah yang mengakibatkan terjadinya perubahan tersebut adalah hasil 'borrowing' dari etnis *Betsileo* yang daerahnya terletak di sebelah Timur wilayah etnis *Tanala*. Dengan berfaknya sistem sawah, maka kehidupan *nomade* berubah menjadi menetap, ikatan kehidupan bersama beralih menjadi kehidupan keluarga, kedudukan hak milik menjadi kuat dan nampak adanya perubahan menuju pemerintahan sentralistis. Dengan makin lepasnya ikatan kelompok, maka makin bebaslah jalanya hubungan seorang anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lainnya. Demikian pula dengan sistem perkawinan yang telah eksogam dan lain-lain.

Contoh sebagaimana pada kelompok *Tanala* di Madagascar tersebut menunjukkan bahwa selama berlangsungnya proses perubahan kultural, disintegrasi dan integrasi berjalan berdampingan. Jadi, pada saat bagian-bagian tertentu dari kebudayaan telah berhasil mengadakan penyesuaian, ada bagian-bagian lain yang baru merasakan gerak perubahan yang ditimbulkan oleh perubahan itu (Kleden, 1992). Pada pokoknya, proses penerimaan unsur baru menimbulkan masa pancaroba: namun masyarakat tetap dapat terus berlangsung hidup. Sedang para anggotanya tetap dapat makan dan berpakaian dan jarang

sekali terjadi suatu unsur kebudayaan yang semula telah diterima cukup merata, kemudian dicampakkan lagi.

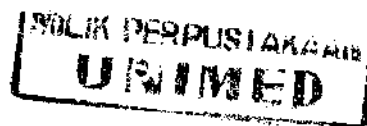
Pada umumnya, unsur yang memang cukup dapat sesuai dengan kebudayaan pihak penerima tidak akan menghancurkan sesuatu masyarakat ataupun kebudayaan. Karena kedua belah pihak saling memiliki vitalita yang mengagumkan dan kapasitas yang hampir tak terbatas untuk melaksanakan perubahan dan adaptasi. Apabila unsur yang masuk mulai tampak menimbulkan kesulitan-kesulitan, maka '*inventive ability*' para anggota masyarakat akan bergerak seketika dan unsur baru itu dengan unsur yang ada akan dirubah sedemikian rupa sehingga dapat saling bertemu. Akan tetapi penting dicatat bahwa, penerimaan terhadap unsur-unsur baru terhadap kebudayaan penerima itu tidaklah selalu sama. Ada unsur yang dapat dikatakan tidak menimbulkan kegoncangan sama sekali dan ada pula yang menimbulkan kegoncangan.

Lain daripada itu, harus pula diperhatikan bahwa unsur yang sama tidak tentu sama akibatnya bagi kebudayaan penerima. Sebagai contoh, Linton mengemukakan, bahwa masuknya agama Kristen di Samoa hanya kecil saja "*disruptive effect*'nya (akibat yang menimbulkan perubahan) dan mudah integrasinya, oleh karena pada jaman pra Eropa agaknya fungsi agama tidak begitu penting di Samoa. Keadaan ini berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi di Madagascar, sebagai akibat masuknya agama Kristen.

Seberapa jauhkah taraf integrasi yang mungkin dicapai di dalam lingkungan kebudayaan? Menurut Linton (1984:269), tak ada sebuah kebudayaan yang pernah mewujudkan integrasi dengan mutlak atau sempurna. Dengan kata

lain, ia (Linton) mendeskripsikan bahwa tak pernah semua unsur-unsur yang ada di dalamnya (kebudayaan) saling sesuai menyesuaikan dengan sempurna, oleh karena di dalam setiap kebudayaan selalu terjadi perubahan, entah berasal di *invention*, atau *diffusion*. Ini berarti, tak pernah ada sebuah kebudayaanpun yang diintegrasikan dengan sempurna pada suatu titik sejarahnya. Dengan demikian, integrasi merupakan persoalan taraf atau tingkat (*a matter of degree*).

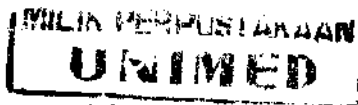
Walau demikian, seperti yang dikemukakan oleh Linton diatas bahwa tidak akan pernah terjadi suatu integrasi kebudayaan yang sempurna dan integrasi hanyalah sebatas persoalan taraf yakni pada tingkat mana masyarakat yang berbeda kebudayaan itu dapat menciptakan saling sesuai dan dapat saling menerima walaupun dibelakang keselarasan dan penerimaan tersebut terdapat juga penolakan. Tetapi yang jelas bagi kita adalah, sepanjang perbedaan itu dapat dipertemukan dengan baik, dalam arti bahwa ketiadaan dominasi dalam setiap bentuk aktivitas maupun kesempatan yang ada maka ia (kebudayaan) tidak akan pernah menjadi bom waktu masyarakat. Justru yang terjadi pada beberapa wilayah tanah air Indonesia adalah adanya dominasi salah satu etnik (biasanya pendatang) terhadap semua kesempatan dan sumber daya dalam wilayah etnik setempat (*host population*). Setidaknya, fenomena ini mengingatkan kita bahwa pentingnya menciptakan keserasian sosial ditengah-tengah masyarakat yang majemuk (*plural societies*) semacam Indonesia.



H. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertitik tolak dari konsep antropologis yaitu keserasian sosial dalam 'social arrangement' atau pengaturan sosial antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang berbeda secara kebudayaan (*cultural differences*) dan sarana pembauran (*melting pot*) yang bermanfaat dalam membentuk keserasian sosial yang terwujud dalam integrasi sosial sebagai dampak dari pembauran kebudayaan itu (Glazer dan Moynihan, 1968)

Pengaturan sosial atau *social arrangement* yang dimaksud dalam hal ini adalah pola-pola yang dikembangkan oleh kedua kelompok yakni masyarakat setempat (*host*) yakni Melayu dan masyarakat pendatang (*migrant*) yakni Mandailing dalam membina hubungan yang relatif baik, sehingga tercipta suasana kehidupan sosial yang serasi, harmonis dan terintegrasi. pola-pola tersebut bisa terwujud melalui interaksi sosial meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, religi, bahasa, adat istiadat maupun politik. Dalam hal ini, peranan institusi sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan, keterlibatan fisik dalam aktifitas sosial, rumah ibadah, organisasi pemuda, perkumpulan olah raga, STM ataupun asosiasi kedaerah akan dilihat sejauh mana peranannya dalam mengupayakan prinsip hidup yang mengutamakan kebersamaan sebagai prakondisi dalam terciptanya keserasian sosial. Dalam hal ini, Pasirpengarayan dimana penelitian ini dilangsungkan adalah sarana dimana pola-pola itu terbentuk yakni sebagai wadah pembauran (*melting pot*) yang melahirkan adanya keserasian sosial yang dimaksud.



Konsentrasi pembauran dari integrasi dua atau lebih kelompok masyarakat yang diarahkan pada kelompok masyarakat setempat (*host population*) dengan pendatang (*migrants*) dalam menciptakan keserasian sosial. Oleh karena itu, konsep kebudayaan dalam terminologi masyarakat majemuk akan sangat diperhatikan untuk menemukan mekanisme terciptanya keserasian sosial dimaksud dalam kacamata masyarakat yang telah menyebar (*berdiaspora*). Selain itu, lebih lanjut, seperti biasanya bahwa pada saat perjumpaan antara dua kelompok etnis yang berbeda secara sosial dan kebudayaan, maka tentu saja akan berdampak yang bisa muncul. Pertama yakni bahwa pertemuan itu dapat berujung dengan terciptanya harmoni atau integrasi, serta dapat pula berujung dengan adanya disharmoni atau disintegrasi. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas bahwa fenomena yang terjadi selama ini yakni adanya harmoni yang terjadi antara kedua kelompok yakni Melayu dan Mandailing. Dengan demikian, yang menjadi konsentrasi penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya keserasian sosial yang berdampak pada terpeliharanya masyarakat Pasirpangrayan. Namun demikian, bukan bermaksud untuk menghindari dampak negatif yang muncul selain terciptanya dampak positif yakni keserasian sosial.

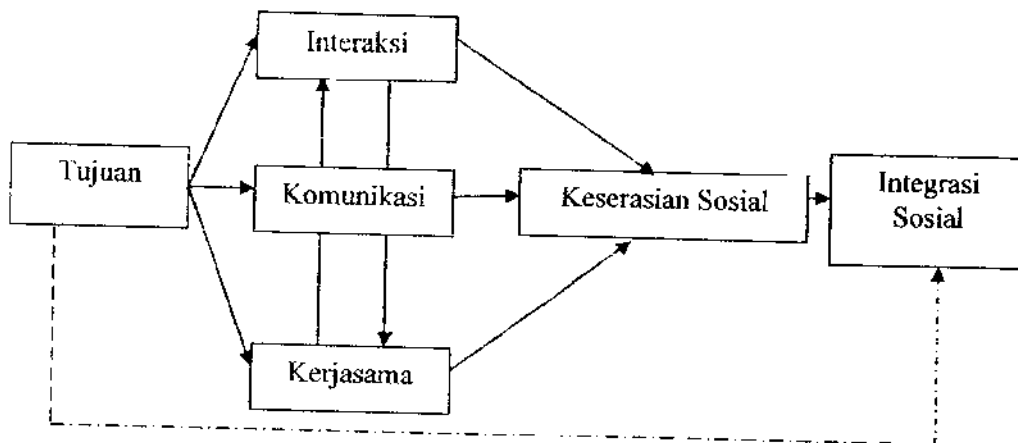
Analisa studi ini lebih difokuskan pada integrasi masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan yang dapat menciptakan keserasian sosial itu. Dengan demikian, keserasian sosial mungkin dapat tercapai apabila integrasi atau mekanisme arah integrasi kebudayaan dapat diciptakan yang dapat berfungsi sebagai wadah pembauran (*melting pot*). Integrasi yang didahului oleh interaksi, komunikasi, dan struktur serta bentuknya pada masyarakat majemuk.

mungkin dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial yang terjadi secara sadar, yakni kecenderungan untuk menerima dan membuka diri terhadap kelompok dan kebudayaan lain.

Tegasnya, semakin membaurnya masyarakat dalam institusi atau lembaga sosial tersebut, maka semakin terbuka peluang untuk terciptanya keserasian sosial. Sebaliknya, semakin memudar (inklusif) fungsi dan peran dari lembaga sosial tersebut maka semakin segregatif kehidupan masyarakat yang sangat berdampak pada tidak terciptanya keserasian sosial. Paradigma ini sekaligus menjadi parameter bagi peneliti untuk melihat berbagai prakondisi dalam menerawang jauh kedepan dalam upaya terciptanya keserasian sosial yang tercipta pada migran Mandailing dengan masyarakat Melayu setempat di Pasirpengarayan Riau.

Sejalan dengan uraian ini maka sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini, berikut di sajikan pada skema-1 dibawah ini, yakni:

Skema-1
Kerangka Alur Pemikiran



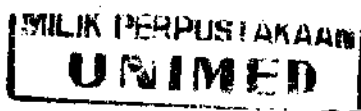
Dari skema diatas tampak bahwa, dua atau lebih kelompok masyarakat yang bertemu pada suatu wilayah tertentu, baik antara masyarakat setempat (*host population*) maupun masyarakat pendatang (*migrant*) memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai integrasi sosial yakni situasi progresif dalam rangka mewujudkan persesuaian antara berbagai unsur-unsur, yang secara bersamaan mewujudkan '*total culture*'. Unsur-unsur tersebut adalah *cultural borrowing* ataupun budaya bawaan dengan budaya yang dijumpai. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tatanan masyarakat yang saling mengerti, terbuka dan tidak inklusif serta tidak segregatif.

Untuk menciptakan keserasian sosial tersebut dibutuhkan beberapa perangkat seperti kontak sosial (interaksi sosial), komunikasi berupa bahasa, dan kerjasama. Oleh karena itu, keserasian semua unsur-unsur kebudayaan antara kedua belah pihak tersebut, pada akhirnya dapat menciptakan integrasi sosial. Dalam arti bahwa, semakin tinggi integrasi antara kebudayaan dari kedua kelompok masyarakat, baik pendatang (*migrant*) maupun masyarakat setempat (*host population*) maka keserasian sosial antara kedua kelompok tersebut semakin mantap sebaliknya, semakin terdisintegrasi kebudayaan kedua kelompok tersebut, maka keserasian sosial semakin sulit tercapai.

Seperti yang telah digariskan pada kerangka teoritis dimuka yakni bahwa konsentrasi kajian ini terfokus pada terciptanya keserasian sosial antara kedua kelompok etnik Melayu dan Mandailing di Pasirpengarayan dan bukan bermaksud untuk meniadakan kemungkinan lainnya. Hanya saja, berdasarkan kenyataan selama ini, fenomena yang terjadi selama ini adalah adanya keserasian sosial yang

terbina diantara kedua kelompok. Oleh karena itu, fokus kajian inipun lebih menitikberatkan pada adanya kenyataan itu. Kenyataan ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa terjadinya kontak antara dua atau lebih kelompok yang berbeda secara sosial dan budaya, tidak selamanya kontak tersebut menciptakan penerimaan atau keserasian sosial. Namun cenderung melahirkan kombinasi-kombinasi seperti adanya segregasi, proliferasi dan bahkan penolakan-penolakan terhadap eksistensi kelompok lainya seperti yang banyak terjadi di beberapa tempat atau kawasan. Oleh karena itu, kajian ini lebih mengkhususkan diri pada terciptanya keserasian sosial sebagai performa yang tampak pada kelompok masyarakat yang berbeda budaya itu.

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa tujuan ditempatkan sebagai variabel bebas sedangkan integrasi diletakkan sebagai variabel terpengaruh (terikat). Diantara kedua variabel tersebut beberapa variabel yang ditempatkan sebagai variabel antara atau variabel moderator pertama yakni interaksi, komunikasi dan kerjasama. Sedangkan keserasian sosial ditempatkan sebagai variabel moderator kedua.



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan realisme sosial yang sebenarnya dan memberikan data secermat mungkin sesuai dengan fakta dan fenomena sosial (Moleong, 1991). Pendekatan ini ditentukan karena masalah yang

akan dikaji adalah berkaitan dengan fenomena sosial yakni masalah keserasian sosial antara kaum pendatang (*migrant*) dengan masyarakat setempat (*host population*)

2. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat (Melayu) dan kelompok pendatang (*Migrant*) Mandailing di Pasirpengarayan Rokan yang bertujuan untuk mendeskripsikan terciptanya keserasian sosial yang terdapat antara kaum migrant dengan penduduk setempat.

3. Pengertian Operasional

Untuk menjalin komunikasi antar pembahasan dalam penelitian ini, dibawah ini akan diuraikan pengertian beberapa konsep yang digunakan dalam operasional penelitian. Konsep itu adalah:

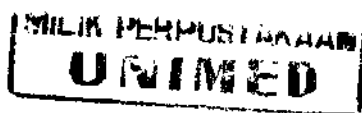
Keserasian Sosial, yakni: adalah bentuk (*pattern*) keberagaman (*togetherness*) dalam suatu masyarakat (majemuk) yang saling berinteraksi komunikatif, terbuka dan dinamis serta tidak segregatif dan eksklusif (Mulyana, 1985). Dengan kata lain adalah suatu keadaan dan suatu proses berinteraksi bersama, dimana hubungan interaksi antar kelompok dan anggota masyarakat lebih bersifat asosiatif sehingga memungkinkan berlangsungnya keberagaman perkembangan berkelompok atau bermasyarakat yang memberikan keadilan dan bathin bagi semua pihak.

Integrasi adalah perkembangan progresif dalam rangka mewujudkan persesuaian yang sempurna antara berbagai unsur-unsur, yang secara bersamaan mewujudkan 'total culture'. Sedang tingkat atau taraf integrasi (penyesuaian) tersebut (*degree of integration*) ialah taraf penyesuaian yang telah dapat dicapai pada suatu titik tertentu di dalam 'culture continuum' (Linton, 1984:266).

Kelompok etnik (*ethnic group*) adalah: populasi yang 1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, 2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, 3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari populasi lain. (Naroll dalam Barth 1988: 11)

Interaksi sosial (*social interaction*) Adalah suatu gejala sosial yang terjadi akibat adanya hubungan yang terjadi antara sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, sedang komunikasi adalah verbalisasi hubungan dengan penggunaan bahasa melalui kata-kata, bahasa dan gerak tubuh, sikap dan perasaan. (Chitambar, 1973).

4. Fokus Penelitian.



Penelitian ini akan sepenuhnya diarahkan pada terciptanya keserasian sosial beserta faktor-faktor yang mendukung terjadinya keserasian tersebut antara kelompok migran Mandailing dengan masyarakat Melayu (*host population*) di Pasirpangrayan Rokan Hulu Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti memilih dan menentukan metode yakni, 1) observasi peserta (*partcipant observation*), 2) wawancara mendalam (*depth interview*) dan 3) Dokumentasi. (Moleong, 1991).

Aplikasi pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung tak terbatas yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan sendiri, kemudian mencatat fenomena dan fakta menurut realita yang sebenarnya. Selain itu, peneliti juga berupaya untuk melibatkan diri pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak masyarakat yang sedang dikaji baik itu berbaur ritual adat istiadat maupun ritual agama maupun aspek aktivitas lainnya.

Sedangkan wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi dalam tiga varian wawancara yakni: a) wawancara terstruktur (*structured interviewing*), yakni peneliti telah mempersiapkan serangkaian daftar pertanyaan sebagai panduan sehingga wawancara dapat lebih terfokus, b) wawancara tak terstruktur (*unstructured interviewing*) yakni wawancara dengan tidak membuat pedoman pertanyaan, melainkan pertanyaan tersebut dapat maju mundur sesuai dengan tema pertanyaan dan c) wawancara sambil lalu (*casual interview*) yakni wawancara yang dilakukan dengan tidak melihat tempat, kondisi dan situasi. Bisa jadi, wawancara terjadi di dalam warung, masjid, atau bahkan di persawahan (Bogdan dan Tylor, 1974).

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, baik data yang bersumber dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisis dan kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian yang deskriptif dan kualitatif, maka analisa data yang dilakukan pun bermuara pada pendeskripsian data-data tersebut untuk menggambarkan realisme sosial.

Sesuai dengan uraian Moleong (1991), maka adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data ini adalah sebagai berikut: 1) pengelompokan data sesuai dengan jenis dan karakteristik data, 2) menyusun kategori yang mengikuti prosedur seperti: a) pengelompokan kartu kedalam isi yang jelas, b) penetapan inklusi setiap kategori yang dapat digunakan untuk meniadakan keabsahan data, dan c) setiap kategori harus dilaksanakan taat azas yang benar tidak direayasa dan tidak tumpang tindih dalam penerapannya. Proses pengkategorian ini dilakukan untuk mempermudah penginterpretasian data.

Tahap selanjutnya adalah menyimpulkan temuan-temuan agar dapat menjelaskan permasalahan secara apa adanya. Setelah proses penginterpretasian data dilakukan, maka langkah ke-3) adalah menarik kesimpulan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

6. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasirpengarayan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas:

1. Eksistensi kelompok etnis Mandailing Pasirpengarayan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Lokasi tersebut merupakan domisili penelitian sekaligus daerah dimana peneliti bertugas.